

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI SMA KOLESE DE BRITTO

THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC EDUCATION POLICY In KOLESE DE BRITTO SENIOR HIGH SCHOOL

Oleh:

Hapsari Desanti (11110244029), Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hapsari_desanti@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan demokrasi di SMA Kolese De Britto dan mengetahui faktor pendukung serta penghambat implementasi kebijakan pendidikan demokrasi di SMA Kolese De Britto.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subyek dari penelitian ini adalah kepala sekolah, guru-guru, dan siswa SMA Kolese De Britto. Sedangkan objek penelitian adalah implementasi kebijakan pendidikan demokrasi di SMA Kolese De Britto. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti dengan menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah 1) Implementasi kebijakan pendidikan demokrasi dalam proses belajar mengajar dilihat dari diskusi silabus dan kelompok karena pada saat diskusi tersebut muncul perbedaan pendapat yang menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing. Dalam sistem kepemimpinan dilihat saat kepala sekolah memimpin jalannya briefing dan cara kepemimpinan ketua kelas dan presidium tercermin pendidikan demokrasi dengan cara menggerakkan anggotanya dalam pelaksanaan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Dalam aktifitas atau keseharian di sekolah pada aktifitas forum angkatan dan forum kelas menunjukkan adanya pendidikan demokrasi, yaitu menyampaikan pendapat walaupun diskusi yang dilakukan hanya melibatkan dua orang. Dalam aturan sekolah dilihat dari tindakan indisipliner siswa yang masih banyak menyalahgunakan kebijakan pendidikan demokrasi sehingga timbul tindakan-tindakan indisipliner. Oleh sebab itu pendidikan demokrasi diimplementasikan pada semua aspek di sekolah agar dapat dipahami dan dihayati secara benar-benar oleh seluruh warga sekolah; 2) Faktor Pendukung adalah adanya visi misi yang jelas, dukungan dari guru dan karyawan, pemahaman yang tepat mengenai pendidikan demokrasi, adanya relasi sekolah dengan kultur yang sama, adanya dukungan alumni dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan siswa, dan status sekolah yang merupakan sekolah swasta. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya kesalahpahaman siswa dalam mengartikan pendidikan bebas dan standarisasi dari Dinas Pendidikan dalam kurikulum, jadwal ujian, dan mata pelajaran.

Kata kunci: *implementasi, pendidikan demokrasi, SMA Kolese De Britto*

Abstract

This study aimed to describe the implementation of democratic education policy in Kolese De Britto Senior High School and determine the supporting as well as the inhibiting factors in the implementation of democratic education policy in Kolese De Britto Senior High School.

This study used qualitative approach with descriptive methods. The subjects of this study were the principal, teachers, and students of Kolese De Britto. While the object of this research was the implementation of democratic education policy in Kolese De Britto Senior High School. The methods of collecting data were done through observation, interview, and documentation. Triangulations which were used in this research are triangulation of sources and techniques. The instruments in this study were researcher using observation, interview, and documentation guidelines. The data analysis that used was data collection, data reduction, data presentation, and verification.

The results of this study were 1) the implementation of democracy education in the learning process can be seen from the syllabus and group discussions because at the time of the discussion, there was a disagreement indicating that each student has unique and individual differences. In the system of leadership can be seen when the principal lead the briefing, class president's leadership and presidium, it reflected democratic education by moving

members in the implementation of education in order to achieve educational goals. In daily activities at school or on the activity of generation and class forum showed a democratic education classes i.e. expressed the opinion although the discussion only involve two people. In school rules, it can be seen from student's disciplinary action which were still many students abuse the democratic education policy so that cause disciplinary actions. Therefore, democracy education was implemented on all aspects in schools so that can be understood and lived in completely by the entire school community; 2) the supporting factors were the clear mission and vision, a support from teachers and employees, a proper understanding of democratic education, school relation with same culture, the support from alumni in carrying out the students activities, and the school status as a private school. While the inhibiting factors were the student's misconceptions in defining free education and the standardization of Education Department in terms of curriculum, exam schedules, and subjects.

Keywords: implementation, democratic education, Kolese De Britto Senior High School

PENDAHULUAN

Prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tanpa diskriminasi, seperti yang disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa. Disebutkan pula pada pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" (Suprijanto Rijadi. 2009. www.Slideshare.net).

Dalam perspektif pendidikan, demokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan warga masyarakat dengan waktu yang lama dan dijiwai oleh semangat kehidupan yang adil dan persaudaraan serta bermartabat (Zamroni,2007: 51). Pendidikan diharapkan akan dapat memainkan peran yang penting untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan cita-cita demokrasi di kalangan siswa, sehingga mereka memiliki kesadaran dan sikap serta perilaku yang mendorong terwujudnya masyarakat yang demokratis (Zamroni, 2002:1-2). Inti dari

demokrasi yakni bahwa dalam kehidupan bermasyarakat harus menjunjung tinggi toleransi, adanya rasa saling menghargai, tolong menolong, persamaan hak dan kewajiban, kebebasan berasumsi, dan kesempatan untuk diterapkan agar sejalan dengan dasar penyelenggaraan pendidikan demokrasi (Fiky Setyowati, 20014: 5-6).

Salah satu sekolah yang mengimplementasikan pendidikan demokrasi dalam kehidupan di lingkungannya adalah SMA Kolese De Britto .Pada tahun 1973, di SMA Kolese De Britto dicanangkan pendidikan bebas.Konsep pendidikan bebas ini merupakan jawaban terhadap keadaan masyarakat yang kurang bisa menerima pendapat yang berbeda dari pendapat umum, khususnya sekitar tahun 1960-1970.Masyarakat lebih mementingkan penampilan luar daripada motivasi dari dalam.Para pendidik di SMA Kolese De Britto merasa bahwa para siswa harus berpendapat sendiri.Pendidikan Kolese Debritto mengutamakan kebebasan yang merupakan perwujudan konkret dari nilai kebebasan anak-anak Allah (Rom. 8:21).Siswa dididik menjadi pribadi yang bebas dari belanggu gengsi, sikap materialistis, dan kecenderungan mengikuti arus. Sebagai manusia yang bebas,

siswa dididik sehingga mampu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya, memperlakukan sesama penuh hormat, berempati terhadap orang miskin dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup. Wujud dari pendidikan demokrasi atau kebebasan di De Britto yaitu bebas berpakaian kecuali berkaos, bebas memakai jenis sepatu atau sandal kecuali bersandal, bebas berambut panjang asal rapih dan tidak diwarnai. Peraturan-peraturan tersebut diberlakukan dengan maksud memberikan pemahaman kepada siswa bahwa mereka adalah individu yang merdeka namun tetap pada aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu kegiatan-kegiatan yang mencerminkan nilai demokrasi di sekolah adalah adanya pemilihan presidium, kegiatan jam perwalian, dan kegiatan forum angkatan.

Secara umum pelaksanaan demokrasi di sekolah hingga saat ini masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain: (1) Pengambilan kebijakan di sekolah masih bisa bertindak otoriter; (2) Pola pengambilan keputusan di sekolah yang sentralistik; (3) Cara penyelesaian masalah yang belum melembaga; (4) Adanya keseragaman dalam berbagai hal; (5) Belum dipahami secara mendasar paradigma baru tentang pendidikan demokrasi (Biyot, 2011). Dapat dilihat jika nilai demokratis dalam ruang lingkup pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dan tidak semua sekolah mampu menanamkan nilai demokrasi dalam kegiatan maupun aktivitas di dalam ruang lingkup sekolah.

Bertolak dari berbagai alasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Pendidikan Nilai Demokrasi Di SMA Kolese De Britto". Ketertarikan peneliti

pada SMA tersebut didasarkan adanya keunikan pendidikan demokrasi yang tidak ditemukan di sekolah yang lain. SMA Kolese De Britto merupakan sekolah yang bernaung dibawah yayasan katolik, berbudaya pendidikan bebas, sekolah ini memiliki peranan yang besar dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa ditengah perbedaan baik fisik maupun psikologis untuk saling toleransi dan menghargai perbedaan sekolah.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (2014:6).

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan atau menggambarkan implementasi kebijakan pendidikan demokrasi di SMA Kolese De Britto secara terperinci.

Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan sebagai sumber data (*social situation*) adalah Sekolah Menengah Atas Kolese De Britto yang beralamat di Jalan Laksda Adisucipto 161 (Jalan Solo Km 4,9), Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Dipilihnya sekolah tersebut didasari pada hasil observasi awal, bahwasanya sekolah tersebut memenuhi kriteria utama dalam penelitian tentang

implementasi kebijakan pendidikan demokrasi di SMA Kolese De Britto. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan pada bulan Agustus s.d Oktober.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang memberikan data tentang variabel yang akan diteliti dan diamati oleh peneliti. Bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pejabat sekolah (Kepala Sekolah), guru, dan siswa. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah kebijakan sekolah yang berfokus pada implementasi kebijakan pendidikan demokrasi di SMA Kolese De Britto.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data berasal dari kegiatan, pelaku kegiatan dan tempat kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan sekolah dalam program kebijakan pendidikan demokrasi. Adapun sumber data primer bersumber dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang dipilih secara *purposive*. Bertindak sebagai narasumber utama (*key informant*) dalam penelitian ini adalah narasumber yang berasal dari masing-masing sekolah yang diteliti, diantaranya 1 Kepala Sekolah, 3 Guru, dan 5 Siswa.

Sementara itu data sekunder diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kebijakan yang telah diputuskan dan pernyataan narasumber dengan implementasinya di lapangan. Sumber data lainnya didapat dari dokumentasi/ arsip terkait kebijakan sekolah dalam menyelenggarakan kebijakan pendidikan demokrasi melalui penelusuran pada dokumen/ arsip sekolah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2014:66). Observasi terstruktur yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti (Sugiyono, 2014:66).

Wawancara, menurut Sugiyono wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (2014:72).

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan (Sugiyono, 2014:82). Dokumen yang peneliti gunakan adalah dokumen yang menyangkut SMA tindak lanjut mengenai nilai demokratis SMA De Britto.

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh di lapangan dicatat direkam dalam bentuk naratif, yaitu uraian data yang diperoleh di SMA Kolese De Brittoapa adanya tanpa komentar peneliti, yang dikembangkan dalam bentuk catatan-catatan kecil dan alat rekam.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi atau dalam arti kata lain adalah merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema atau pola serta membuang hal-hal yang tidak dianggap penting. (Sugiyono, 2010: 338). Dengan demikian data yang telah diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung, yang didapatkan selama proses observasi, wawancara dan dokumen akan dipilah beberapa hal yang penting dan pokok agar sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan dari penelitian ini.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lainnya. Fungsi dari display data untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan dapat merencanakan kegiatan selanjutnya dengan berdasarkan pemahaman tersebut (Sugiyono, 2010: 341).

4. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Verifikasi merupakan tahap untuk penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal merupakan kesimpulan yang bersifat sementara dan kemudian akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk tahap penarikan kesimpulan berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang diuraikan pada tahap awal merupakan kesimpulan yang kuat dan didukung

dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan kembali pengumpulan data di lapangan, maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel (Sugiyono, 2010: 345).

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menggunakan tiga bentuk instrumen yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting, dalam Sugiyono (2012: 330) suatu penelitian yang baik memerlukan data yang valid, kredibel, dan reliabel. Proses pengujian keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Triangulasi dengan pengecekan data dari sumber, cara, waktu, yang berbeda. Peneliti melakukan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan cara membandingkan informasi dari satu orang dengan informasi dari orang lain. Hal ini dilakukan untuk melakukan *Crosscheck* dari seseorang yang kadang-kadang bisa berubah karena bisa mengikuti orang atau dipengaruhi oleh kepentingan dan lain-lain. Sedangkan triangulasi teknik peneliti melakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari teknik wawancara dan membuktikannya dengan teknik observasi dan dokumentasi. Tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh bukan informasi yang sembarangan tetapi berdasarkan pada realitas yang ada.

2. Melakukan validitas data agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melakukan diskusi dengan dosen pembimbing skripsi dengan maksud validitas data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi SMA Kolese De Britto

SMA yang lebih dikenal dengan nama De Britto atau "JB" (kependekan dari Johannes De Britto) ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Bermula dari suatu kebutuhan mendesak waktu itu. Sesaat setelah pemerintah pendudukan Jepang mencabut peraturan yang melarang pihak swasta mendirikan sekolah, para Bruder CCI bersama suster-suster Carolus Borromeus dan Fransiskanes mendirikan sebuah sekolah menengah katolik, setingkat SMP. Untuk menampung lulusan SMP itulah dirasa mendesak adanya sebuah sekolah menengah atas yang bersendikan asas-asas katolik. Atas persetujuan bersama Yayasan Kanisius di bawah pemimpin Romo Djojoseputro dengan para romo Jesuit dan para suster Carolus Borromeus didirikanlah Sekolah Menengah Atas Kanisius, yang dibuka secara resmi pada tanggal 19 Agustus 1948.

SMA Kolese De Britto terletak di beralamat di jalan Laksda Adisucipto 161 (Jalan Solo Km 4,9), Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Terletak di dekat perbatasan kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Dibangun di atas tanah seluas 32.450 m². Kolese De Britto (*De Britto College* atau yang lebih dikenal dengan akronim JB [jébé] yang berasal dari nama Johannes de Britto.), adalah Sekolah Menengah Atas Katolik yang diasuh oleh Serikat Jesuit. SMA ini termasuk salah satu SMA favorit di Yogyakarta dan terkenal

karena prestasi di bidang akademis dan intelektual, olah raga, dan bidang non-akademis lainnya. Nama 'de Britto' sendiri didapat dari nama seorang Santo dan misionaris Portugal pada abad ke-17 yang berkarya di India, Johannes de Britto.

Makna mendasar dari lambing De Britto yakni; Kolese De Britto yang dijiwai oleh semangat kristiani yang bersumber dari Allah Tritunggal (Bapa, Putra, dan Roh Kudus) bercita-cita meraih keunggulan dengan dilandasi hati yang bersih untuk mewujudkan hidup damai bersama dengan orang lain.

Pada tahun ajaran 2014/2015 SMA Kolese De Britto memiliki 705 siswa, meliputi 232 siswa kelas X yang terbagi dalam kelas , 241 siswa kelas XI yang terbagi dalam 5 kelas reguler IPA, 3 kelas reguler IPS, dan 1 kelas Bahasa, kemudian di kelas XII terdapat 232 siswa yang terbagi dalam 5 kelas reguler IPA, 3 kelas reguler IPS dan 1 kelas Bahasa.

Siswa Kolese De Britto memiliki banyak prestasi di bidang olah raga maupun non-olah raga. Untuk bidang olah raga, secara spesifik De Britto terkenal dengan prestasi basketnya, yang pada tiga tahun terakhir berturut-turut menjuarai DBL (Liga Bola Basket SMA) dan menempatkan beberapa pemainnya mewakili Yogyakarta dalam Liga DBL Nasional. Sementara untuk non-olah raga, De Britto terkenal dengan prestasi debatnya, dengan beberapa kali menjuarai lomba debat nasional. Fotografi rutin mengadakan pameran terbuka untuk umum. Demikian juga secara perseorangan siswa-siswa De Britto banyak menyabet kejuaraan daerah maupun nasional dalam bidang akademik/olimpiade sains dan karya tulis lainnya.

B. Makna pendidikan demokrasi di SMA

Kolese De Britto

Pemahaman para siswa mengenai pendidikan demokrasi, peneliti lihat dari apa yang mereka bahas pada saat forum dilaksanakan. Salah satunya dalam forum angkatan, sebagian besar siswa aktif berdiskusi dalam membahas permasalahan yang sedang menjadi topik. Namun yang peneliti lihat, siswa-siswa yang aktif berdiskusi tersebut hanya mendiskusikan dengan teman disebelahnya dan tidak mengusulkan ke forum. Aktifitas berdiskusi tersebut menunjukkan adanya pendidikan demokrasi, yaitu menyampaikan pendapat walaupun diskusi yang dilakukan hanya melibatkan dua orang.

C. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Demokrasi di SMA Kolese De Britto.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, implementasi kebijakan pendidikan demokrasi dalam proses belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan memberikan kebijakan membuat kelompok pada setiap mata pelajarannya. Pada saat melakukan observasi, peneliti menjumpai hal tersebut pada mata pelajaran sejarah, dimana guru menyuruh semua siswanya membuat beberapa kelompok. Setelah kelompok sudah terbentuk kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan oleh para siswa. Pada saat diskusi berlangsung ada kelompok yang semua anggotanya aktif dan ada kelompok yang hanya beberapa anggotanya aktif dalam bertukar argument. Pembentukan kelompok tersebut dibentuk agar siswa belajar berdemokrasi menghargai pendapat setiap orang.

Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan demokrasi ini sangat besar. Selain kepala sekolah, dewan direksi juga berperan, karena dewan direksi lah yang membantu kinerja kepala sekolah termasuk dalam hal pembuatan kebijakan. Peran kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi di sekolah ini juga terwujud pada dukungan dalam berbagai kegiatan dan kebijakannya dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan pendidikan demokrasi.

Pada saat briefing pagi kepala sekolah dengan guru-guru mengevaluasi proses pembelajaran hari sebelumnya kemudian membahas kegiatan yang akan dilakukan sehari ke depan, dengan tujuan untuk mencapai pengajaran yang lebih baik. Bentuk dari pendidikan demokrasi pada saat briefing yaitu kepala sekolah mendengarkan pernyataan guru-guru dan memimpin diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan hari sebelumnya.

Berbagai macam aktifitas di sekolah mencerminkan kebijakan pendidikan demokrasi. Aktifitas tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi kultur sekolah yang melibatkan demokrasi dalam keyakinan, cara, norma, dan tata kelakuan. Demokrasi dalam kultur sekolah dijadikan energi positif untuk mencapai target dan tujuan perbaikan kualitas sekolah. Kemampuan warga sekolah dalam mempraktikan nilai-nilai demokrasi dilakukan melalui sikap kerja yang konsisten dan profesional, hal tersebut menjadi kunci sukses perbaikan kualitas sekolah.

Peneliti juga mengamati aktifitas para siswa dalam forum angkatan yang diselenggarakan oleh tiap angkatan. Forum angkatan diselenggarakan untuk memecahkan

masalah yang ada di setiap angkatan. Pada saat peneliti melakukan observasi, siswa kelas XI sedang menyelenggarakan forum angkatan di Auditorium sekolah. Forum angkatan diselenggarakan diluar jam pelajaran sehingga tidak mengganggu aktifitas akademik. Seluruh siswa kelas XI terlihat antusias dalam mengikuti forum tersebut dengan tema permasalahan JB Mania atau supporter tim basket SMA Kolese De Britto. Dalam forum tersebut, salah satu siswa memimpin jalannya diskusi, membahas dan menjelaskan beberapa konsep yang akan ditampilkan dalam pertandingan basket yang akan datang, siswa lain memberikan pertimbangan dan memutuskan konsep yang akan digunakan secara musyawarah. Dalam proses diskusi tersebut, terlihat unsur demokrasi yang diusung oleh siswa De Britto untuk memutuskan sesuatu hal secara musyawarah mufakat. Selain itu walaupun siswa-siswa De Britto tidak memakai seragam yang sama dan berpenampilan bebas, peneliti melihat bahwa proses belajar mengajar dan pergaulan antar siswa tetap dapat berjalan harmonis dan dinamis.

Memang masih ada siswa yang belum begitu paham mengenai apa itu pendidikan bebas dan kemudian melakukan tindakan indisipliner, hal tersebut kebanyakan dilakukan oleh siswa kelas X dikarenakan mereka masih berada dalam proses adaptasi. Tindakan indisipliner tersebut dilakukan karena mereka belum memahami betul apa makna pendidikan bebas. Berdasarkan pernyataan diatas didapat pula keterangan bahwa justru sebenarnya dengan dipahaminya pendidikan bebas secara benar, maka siswa akan dapat berperilaku disiplin karena kebebasan yang mereka lakukan adalah kebebasan yang

bertanggung jawab, serta dapat mereka implementasikan pada kehidupan sehari-harinya di luar sekolah.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Adanya Kebijakan Pendidikan Demokrasi

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan demokrasi di SMA De Britto tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dan penghambat tersebut berasal dari internal dan eksternal.

Faktor pendukung internal adalah adanya visi misi yang jelas, dukungan dari guru dan karyawan, serta adanya pemahaman yang tepat pada siswa bahwa pendidikan demokrasi atau bebas ini adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Sementara itu faktor pendukung eksternal pendidikan demokrasi ini adalah adanya relasi sekolah yang juga memiliki kultur dan pendidikan demokrasi, adanya dukungan alumni dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan siswa, dan status sekolah yang merupakan sekolah swasta jadi kebijakan yang dikeluarkan tidak bergantung pada dinas pendidikan,

Faktor penghambat internal antara lain kurangnya pemahaman nilai-nilai kebebasan, kurangnya keterbukaan siswa untuk mengutarakan kekurang pahaman nilai-nilai kebebasan, munculnya tindakan-tindakan indisipliner, dan penyalahgunaan kebijakan pendidikan demokrasi oleh beberapa siswa. Selain itu faktor penghambat eksternalnya adalah standarisasi dari Dinas Pendidikan yang berupa kurikulum, jadwal ujian, dan mata pelajaran.

Secara internal upaya yang dilakukan diantaranya adalah guru memanggil siswa yang bermasalah, guru menasehati siswa agar tidak

melakukan tindakan indisipliner, guru melakukan pendampingan, dan guru memberikan pengarahan pada siswa mengenai makna kebebasan. Selain itu secara eksternal pihak sekolah juga mengadakan rapat rutin dengan Dinas Pendidikan terkait dengan pelaksanaan pendidikan bebas.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pendidikan demokrasi di SMA Kolese De Britto dilakukan dalam proses belajar mengajar, sistem kepemimpinan, aktifitas atau keseharian di sekolah, dan aturan sekolah. Pendidikan demokrasi diimplementasikan pada semua aspek di sekolah agar dapat dipahami dan dihayati secara benar-benar oleh seluruh warga sekolah.

Implementasi kebijakan pendidikan demokrasi dalam proses belajar mengajar dilakukan dengan mengintegrasikannya ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan silabus. Selain itu juga dilaksanakan dalam pembiasaan praktek berdiskusi kelompok di kelas. Pelaksanaan pendidikan demokrasi juga diwujudkan dengan membebaskan siswa untuk membeli dan menggunakan buku paket. Pendidikan demokrasi nampak jelas dalam proses belajar mengajar, terutama dalam diskusi kelompok. Hal tersebut dikarenakan pada saat diskusi kelompok muncul perbedaan pendapat yang menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing. Implementasi kebijakan pendidikan demokrasi dalam proses belajar mengajar merupakan pembiasaan yang paling mendasar dalam kehidupan di sekolah karena belajar mengajar merupakan kegiatan inti dari sekolah.

Implementasi kebijakan pendidikan demokrasi dalam sistem kepemimpinan ini masuk

dalam salah satu nilai-nilai dan karakteristik demokrasi sebagai jiwa yang menghidupkan persekolahan yaitu nilai struktur. Struktur merupakan instrument yang diperlukan untuk dapat memberikan fasilitas berlangsungnya demokrasi (Zamroni, 2013:4).

Implementasi kebijakan pendidikan demokrasi dalam aturan sekolah dilakukan dengan tanggungjawab dari setiap siswa. Ditunjukkan dari pernyataan seorang guru Bimbingan Konseling bahwa sedikit point yang didapat siswa yang menyangkut adanya kebijakan kebebasan di sekolah. Dalam hal aturan, sekolah membebaskan siswa dalam berpenampilan, maka dalam kesehariannya siswa menggunakan pakaian bebas (tidak berseragam) dan sepatu dengan warna bebas, terlebih juga berambut panjang (gondrong). Aturan-aturan yang ditetapkan di sekolah ini digunakan untuk menindak perilaku-perilaku indisipliner, namun pada kenyataannya menurut hasil penelitian tindakan-tindakan indisipliner tidak begitu banyak karena para siswa telah memahami pendidikan demokrasi dengan baik. Meskipun begitu walaupun tidak banyak, tetap ada tindakan indisipliner yang dilakukan oleh beberapa siswa kelas X yang masih baru dan belum begitu memahami arti pendidikan demokrasi.

Pada prinsipnya demokrasi tercipta untuk saling menghargai dan menghormati. Keadaan ini menciptakan suasana kesetaraan tanpa sekat-sekat kesukuan, agama, derajat, serta status ekonomi. Dengan keadaan tersebut manusia mempunyai ruang untuk mengekspresikan diri secara bertanggungjawab. Situasi seperti inilah yang dibangun di SMA Kolesse De Britto agar

para siswa dapat mengembangkan potensi-potensinya.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan demokrasi terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal. Berikut ini merupakan faktor pendukung internal dari implementasi kebijakan pendidikan demokrasi di SMA Kolese De Britto diantaranya adalah adanya visi misi yang jelas, dukungan dari guru dan karyawan, serta adanya pemahaman yang tepat pada siswa bahwa pendidikan demokrasi atau bebas ini adalah kebebasan yang bertanggungjawab.

Selain itu, sekolah ini juga memiliki nilai kebebasan yang menyebutkan bahwa siswa dididik menjadi pribadi yang bebas dari belenggu gengsi, sikap materialistis, dan kecenderungan mengikuti arus. Siswa dididik untuk mampu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya.

Atas dasar itulah sekolah melaksanakan pendidikan demokrasi sehingga seluruh guru dan karyawan mendukung sepenuhnya. Dukungan dari guru dan karyawan juga dikarenakan pemahaman yang benar bahwa pendidikan demokrasi atau pendidikan bebas ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

Sementara itu faktor pendukung eksternal pendidikan demokrasi ini adalah adanya relasi sekolah yang juga memiliki kultur dan pendidikan demokrasi yang sama dengan SMA Kolese De Britto, adanya dukungan alumni dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan siswa, dan status sekolah yang merupakan sekolah swasta sehingga sekolah memiliki otoritas dalam menerapkan kebijakn sekolah terkait pendidikan demokrasi. SMA Kolese De Britto sebagai sekolah swasta

memiliki keistimewaan lain yaitu kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di sekolah tersebut semenjak pertama kali berdiri. Faktor-faktor pendukung inilah yang membuat kebijakan pendidikan demokrasi di SMA Kolese De Britto terus dapat dilaksanakan.

Selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan demokrasi. Faktor penghambat internal dari implementasi kebijakan demokrasi antara lain kurangnya pemahaman nilai-nilai kebebasan, kurangnya keterbukaan siswa untuk mengutarakan kekurang pahaman nilai-nilai kebebasan, munculnya tindakan-tindakan indisipliner, dan penyalahgunaan kebijakan pendidikan demokrasi oleh beberapa siswa. Kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai kebebasan dialami oleh beberapa siswa kelas X yang baru saja masuk. Mereka belum begitu memahami arti kebebasan dalam pendidikan demokrasi di sekolah karena masih dalam masa transisi dari siswa SMP ke SMA. Di sisi lain, adanya ketidak terbukaan siswa-siswa yang tidak begitu paham makna pendidikan demokrasi malah mengakibatkan mereka bertindak secara indisipliner. Kurangnya pemahaman itu juga mengakibatkan siswa menyalahgunakan kebebasan dalam pendidikan demokrasi.

Selain itu faktor penghambat eksternalnya adalah standarisasi dari Dinas Pendidikan yang berupa kurikulum, jadwal ujian, dan mata pelajaran. Walaupun SMA Kolese De Britto merupakan sekolah swasta, namun sekolah ini juga masih berada dibawah wewenang Dinas Pendidikan, jadi kurikulum, jadwal ujian, dan mata pelajaran yang harus dilaksanakan juga harus

mengikuti peraturan yang ada. Faktor-faktor penghambat tersebut terus diusahakan untuk diperbaiki dan diminimalisir agar pendidikan demokrasi tetap dapat diimplementasikan di SMA Kolese De Britto.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Demokrasi di SMA Kolese De Britto dilakukan melalui proses belajar mengajar, sistem kepemimpinan, aktifitas atau keseharian di sekolah, dan aturan sekolah. Pada implementasi kebijakan pendidikan demokrasi dalam proses belajar mengajar dilihat dari adanya diskusi silabus dan diskusi kelompok karena pada saat diskusi silabus dan diskusi kelompok akan muncul perbedaan pendapat yang menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing. Implementasi kebijakan pendidikan demokrasi dalam sistem kepemimpinan dilihat pada saat kepala sekolah memimpin jalannya briefing dan cara kepemimpinan ketua kelas dan presidium. Sistem kepemimpinan mereka tercermin dalam adanya pendidikan demokrasi yaitu cara memimpinya sudah menggerakkan anggotanya dalam pelaksanaan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan demokrasi dalam aktifitas atau keseharian di sekolah dilihat dari pemahaman siswa mengenai pendidikan demokrasi, seperti pada forum angkatan. Aktifitas berdiskusi tersebut menunjukkan adanya pendidikan demokrasi, yaitu menyampaikan pendapat

walaupun diskusi yang dilakukan hanya melibatkan dua orang. Implementasi kebijakan pendidikan demokrasi dalam aturan sekolah dilihat dari tindakan indisipliner siswa yang masih banyak menyalahgunakan kebijakan pendidikan demokrasi sehingga timbul tindakan-tindakan indisipliner seperti pada bebas memakai baju, bebas bersepatu dan bebas berambut panjang tetapi tidak bertanggung jawab atau tidak pada aturannya. Oleh sebab itu pendidikan demokrasi diimplementasikan pada semua aspek di sekolah agar dapat dipahami dan dihayati secara benar-benar oleh seluruh warga sekolah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Demokrasi di SMA Kolese De Britto antara lain faktor pendukung internalnya adalah adanya visi misi yang jelas, dukungan dari guru dan karyawan, serta adanya pemahaman yang tepat pada siswa bahwa pendidikan demokrasi atau bebas ini adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Sementara itu faktor pendukung eksternal pendidikan demokrasi ini adalah adanya relasi sekolah yang juga memiliki kultur dan pendidikan demokrasi yang sama dengan SMA Kolese De Britto, adanya dukungan alumni dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan siswa, dan status sekolah yang merupakan sekolah swasta sehingga memiliki otoritas dalam membuat kebijakan sekolah sesuai peraturan di sekolah tersebut. Sedangkan faktor penghambat internal dari implementasi kebijakan demokrasi adalah adanya kesalahpahaman siswa dalam mengartikan pendidikan bebas yang kadang melenceng dan merugikan oranglain, dan faktor penghambat eksternalnya adalah standarisasi

dari Dinas Pendidikan yang berupa kurikulum, jadwal ujian, dan mata pelajaran yang kadang bentrok dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, sehingga sekolah harus menyesuaikan dengan peraturan yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan.

Saran

Bersumber pada temuan dan kesimpulan, sebagai bentuk rekomendasi, maka peneliti menyarankan beberapa hal kepada pihak yang terkait implementasi implementasi kebijakan pendidikan demokrasi di SMA Kolese De Britto sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus mendukung implementasi kebijakan pendidikan demokrasi dengan cara terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, dan mendorong sekolah agar segera membuat pedoman pelaksanaan agar sekolah tidak kebingungan dalam melakukan pengelolaan, monitoring, serta evaluasi.

2. Bagi Sekolah

Sekolah perlu mengadakan studi banding kepada sekolah yang sudah memiliki kebijakan pendidikan demokrasi (pendidikan bebas) .Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat mendukung sekolah berpendidikan bebas.

3. Bagi Siswa

Siswa seharusnya lebih memahami pendidikan demokrasi secara benar dan bertanggungjawab, agar dapat mematuhi aturan yang ada dan mencegah diri dari tindakan indisipliner.

4. Bagi Dunia Pendidikan

Mereferensikan pendidikan demokrasi untuk diimplementasikan ke sekolah-sekolah lain sesuai dengan kemampuannya agar siswa tidak bosan dengan pereturan-peraturan yang biasanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Biyot.(2011). *Demokrasi Sekolah*.Diunduh dari <http://biyot.wordpress.com/2011/05/05/demokrasi-sekolah> pada Rabu 1 Juli 2015 pukul 12.00 WIB.
- Fiky Setyowati. (2014). *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Di Sekolah Inklusi*. Yogyakarta: UNY
- Lexy J. Moleong.(2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1.*Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Sugiyono.(2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Zamroni .(2002). *Demokrasi Dan Pendidikan Dalam Transisi : Perlunya Reorientasi Pengajaran Ilmu-Ilmu Sosial Si Sekolah Menengah*. Yogyakarta : UNY.
- _____. (2007). *Pendidikan Dan Demokrasi Dalam Transisi*. Jakarta: PASP Muhammadiyah.
- _____. (2011). *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- _____. (2013). *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Penerbit Ombat.